



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3613-3624

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim

Juanda<sup>1✉</sup>, Djaffar Mappa<sup>2</sup>, Ahmad Sirajuddin<sup>3</sup>

Politeknik Maritim AMI Makassar

Email: [Juanda@gmail.com](mailto:Juanda@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini fokus pada analisis kapasitas pemerintah daerah dalam menggerakkan potensi maritim di Kabupaten Selayar. Landasan teori yang digunakan mencakup Teori Kapasitas, Konsep Pemerintah Daerah, Konsep Otonomi Daerah, Visi Otonomi Daerah, dan Definisi Maritim. Penelitian ini dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu upaya untuk menggambarkan fenomena yang diselidiki secara apa adanya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara teori-teori yang ada dan data yang diperoleh dari studi kasus. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengadopsi strategi eksternal dan internal. Strategi-strategi ini dirancang untuk bekerja secara bersamaan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan seperti ancaman dari segi ekologi meliputi penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran, kerusakan ekosistem, dan praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pengetahuan, dan teknologi, pemerintah mengambil pendekatan bermitra dengan pihak lain sebagai salah satu solusi, mengoptimalkan perbaikan infrastruktur secara keseluruhan. Pendekatan ini dianggap efektif untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah dalam memberdayakan potensi maritim dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Selayar.

Kata Kunci: *peningkatan kapabilitas, maritim, strategi,*

## Abstract

This research focuses on analyzing the capacity of local government in mobilizing maritime potential in Selayar Regency. The theoretical basis used includes the Capacity Theory, the Regional Government Concept, the Regional Autonomy Concept, the Regional Autonomy Vision, and the Maritime Definition. This research was carried out using a qualitative approach with a qualitative descriptive method, which is an attempt to describe the phenomenon being investigated as it is in the field. This approach involves a comparison between existing theories and data obtained from case studies. Data collection methods include interviews, observation, and documentation. The results of the research indicate that local governments adopt external and internal strategies. These strategies are designed to work together. In overcoming obstacles such as threats from an ecological perspective including environmental degradation due to pollution, ecosystem damage, and overfishing practices, knowledge, and technology, the government takes a partnering approach with other parties as a solution, optimizing infrastructure improvements. overall. This approach is considered effective in maximizing government capacity in empowering maritime potential and promoting people's welfare in Selayar District.

Keywords: *capability improvement, maritime, strategy,*

## PENDAHULUAN

Dari segi letak geografisnya, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari dua pertiga luasannya terdiri dari lautan, yang jauh lebih besar daripada wilayah daratannya. Ini terlihat jelas dari panjang garis pantai yang melekat pada hampir setiap pulau di Indonesia (sekitar 81.000 km), menjadikan negara ini menduduki peringkat kedua setelah Kanada dalam hal panjang garis pantai global. Keberadaan ini memberikan peluang yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam produksi perikanan, hanya berada di bawah China dan India. Lebih lanjut, wilayah perairan Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa, dengan sekitar 70 persen cadangan minyak yang disimpan di dalamnya dan diperkirakan terdapat sekitar 40 cekungan minyak di perairan Indonesia.

Peranan pemerintah sangat penting (dibutuhkan oleh pemerintah) untuk menjaga, melindungi, serta mengelola kekayaan dan potensi maritim di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya alam laut dengan efektif. Konsep ini sejalan dengan teori lain yang diajukan oleh Alfred Thayer Mahan tentang elemen-elemen yang perlu ada untuk membangun kekuatan maritim. Faktor-faktor tersebut meliputi posisi dan kondisi geografis, luas wilayah, jumlah dan karakteristik penduduk, dan yang paling krusial adalah bagaimana pemerintahan dijalankan. Oleh karena itu, dari perspektif pertahanan, penguasaan atas laut

memiliki arti yang besar, karena ini akan memastikan penggunaan laut yang menguntungkan bagi kepentingan nasional dan menghindari lawan untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki oleh negara kita. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki batas perbatasan maritim dengan sepuluh negara, yaitu India (meliputi Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE), Thailand (meliputi Landas Kontinen dan ZEE), Malaysia (meliputi Laut Wilayah, ZEE, dan Landas Kontinen), Singapura (meliputi Laut Wilayah), Vietnam (meliputi Landas Kontinen dan ZEE), Filipina (meliputi ZEE dan Landas Kontinen), Palau (meliputi ZEE dan Landas Kontinen), Papua Nugini (meliputi ZEE dan Landas Kontinen), Timor Leste (meliputi Laut Wilayah, Landas Kontinen, dan ZEE), serta Australia (meliputi ZEE dan Landas Kontinen).

Tantangan dalam pembangunan sektor maritim menuntut adanya kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini, pengelolaan laut di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan adanya banyak lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut, situasinya dapat menjadi peluang dan juga tantangan dalam pembangunan sektor maritim. Hal ini bisa menjadi peluang apabila semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan laut dapat bekerja secara sinergis, tetapi juga bisa menjadi hambatan apabila kolaborasi yang diperlukan tidak berjalan dengan baik.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara seadanya di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran yang terstruktur, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta yang relevan dengan cakupan penelitian. Responden yang menjadi subjek penelitian ini adalah individu yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang data, informasi, serta fakta terkait objek penelitian (Bungin, 2009). Hal ini mencakup pemerintah, tokoh masyarakat, dan nelayan yang berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Selayar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Selayar, terletak di bagian selatan Sulawesi, memiliki koordinat geografis antara 1200 21,00' - 1200 23,00' LS dan 060 11,50' - 06012,50' BT. Meskipun berada dalam wilayah Sulawesi Selatan, pulau ini merupakan sebuah kabupaten yang terpisah dari daratan utama. Potensi maritim di Kabupaten Selayar sangat melimpah dan belum sepenuhnya tergali. Berbagai jenis ekosistem, keindahan bawah laut, dan ragam spesies makhluk hidup hidup di perairan sekitar Kepulauan Selayar. Sektor kelautan di wilayah ini menawarkan potensi yang menjanjikan untuk pengembangan pesisir dan laut. Pantai-pantai yang indah tersebar di sini dan sangat cocok sebagai destinasi wisata bahari. Lebih lagi, Kabupaten Selayar memiliki kepulauan Taka Bonerate yang terkenal sebagai daerah dengan terumbu karang terindah dan terluas. Keindahan bawah lautnya memang patut diakui dan menjadi daya tarik tersendiri. (Manaf, Murshal. 2015).

Kepulauan Selayar terletak di dalam Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia, yang membuatnya kaya akan keanekaragaman hayati laut. Daerah ini mengandung sekitar 600 spesies terumbu karang, yang mencakup 75% dari seluruh spesies karang yang ada di seluruh dunia. Perairan Coral Triangle juga menjadi habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan, termasuk ikan terbesar seperti hiu paus, dan juga menyimpan fosil hidup coelacanth.

Pemanfaatan sumber daya hayati laut yang dilakukan dengan baik dan benar di wilayah ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pendapatan daerah dan devisa negara. Potensi ini terwujud melalui sektor pariwisata, sektor ekonomi, serta pengolahan hasil perikanan. Lebih dari sekadar keuntungan finansial, pendekatan yang berkelanjutan terhadap potensi laut ini akan membantu menjaga dan melestarikan lingkungan laut, sehingga ekosistem pun dapat terus membaik secara berkelanjutan.

Upaya pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekologi maupun sosial. Ancaman dari segi ekologi meliputi penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran, kerusakan ekosistem, dan praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Di sisi lain, dari perspektif sosial, tantangan meliputi keterbatasan aksesibilitas dan rendahnya partisipasi serta penerimaan masyarakat lokal. Sektor perikanan masih belum optimal karena beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor ini. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas serta kurangnya modal usaha menjadi hambatan dalam pengembangan usaha perikanan.

## Upaya pengembangan potensi maritim di kabupaten kepulauan selayar

Strategi pemerintah daerah dalam perwujudan poros maritim di Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Dalam konteks penggunaan anggaran daerah yang melibatkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta mempertimbangkan urusan wajib dan urusan pilihan, penting untuk memiliki arah kebijakan anggaran pembangunan yang terdefinisi dengan jelas. Tujuan utamanya adalah agar penggunaan anggaran daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan profesional. Selain itu, dalam penegakan hukum, prinsip mengedepankan undang-undang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam penindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama di Taman Nasional Taka Bonerate.

Selain itu, perkuatannya juga dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Hal ini termasuk dalam upaya memperkuat integritas batas wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu pendekatannya adalah dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, dan Kabupaten Bone. Kerjasama semacam ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga dan mengelola perairan tersebut dengan lebih baik.

2. Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung implementasi program poros maritim. Salah satu caranya adalah melalui pembangunan pelabuhan dan pengembangan armada laut. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa yang masuk dan keluar wilayah, sambil juga menjadi faktor pendukung bagi potensi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi keunggulan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam rangka mencapai hal ini, dilakukan perencanaan pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyelenggaraan administrasi kepegawaian, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota aparatur pemerintah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## Pembahasan

Secara umum, kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengorganisasi dan melaksanakan berbagai fungsi, mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, *capacity building* dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan berbagai strategi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab kinerja pemerintah.

Menurut pandangan Grindle (1977), *capacity building* merangkum berbagai strategi yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Definisi lain menggambarkan *capacity building* sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk di negara-negara berkembang dalam mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial untuk membangun struktur budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sumber daya manusia. Dengan demikian, *capacity building* bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut definisi yang diajukan oleh Brown dan rekannya (2001), *capacity building* merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lain juga menggambarkan *capacity building* sebagai upaya untuk membantu pemerintah, masyarakat, atau individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Program-program pengembangan kapasitas seringkali dirancang untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan menerapkan keputusan dengan cara yang efektif. Dengan demikian, *capacity building* memiliki peran penting dalam membangun kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang. Faktor non-ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung pada sejauh mana dukungan yang diperoleh dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, persoalan pembangunan dimulai dengan pemilihan strategi besar, yang melibatkan pertimbangan pembiayaan serta isu-isu politik yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan sumber daya finansial. Dalam konteks ini, strategi pembangunan di Indonesia harus selalu dievaluasi dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang ada (Prasetyantoko, Bahagijo, & Budiyanto, 2012).

Sebelum pelaksanaan suatu program *capacity building* pemerintahan, terutama di tingkat daerah, terdapat beberapa syarat penting yang perlu dipahami. Syarat-syarat tersebut meliputi partisipasi masyarakat, inovasi, akses terhadap informasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang efektif (Yuwono, 2003). Kesemua faktor ini memiliki peran penting

dalam memastikan bahwa program capacity building berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah daerah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut: Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi tersebut, pemerintah daerah mengacu pada penyelenggaraan urusan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip desentralisasi. Unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah mendapatkan wewenang pemerintahan umum melalui pelimpahan dari pemerintah pusat. Wewenang ini mencakup hak untuk mengambil tindakan-tindakan demi kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum secara bertahap diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga daerah, yang didekati dengan prinsip desentralisasi. Namun, urusan yang bersifat nasional dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah dapat diartikan sebagai proses interaksi antara pihak yang memiliki wewenang, yaitu pemerintah, yang memberikan instruksi dan perintah, dengan pihak yang menerima dan melaksanakan instruksi tersebut, yaitu masyarakat. Ini mengacu pada dinamika di mana pemerintah sebagai lembaga berwenang memberikan arahan dan masyarakat sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan perintah tersebut.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengharuskan upaya antisipatif dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Paradigma terkini dalam pengelolaan pemerintahan terkait dengan era reformasi adalah demokratisasi. Pengelolaan sistem pemerintahan daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (Sarundajang, 2005).

Konsep otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan memiliki visi yang dapat ditarik dari tiga ruang lingkup utama yang saling terhubung: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Otonomi daerah, yang timbul dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, di bidang politik berarti memberikan ruang bagi pemilihan kepala pemerintahan daerah secara demokratis. Di sisi ekonomi, otonomi daerah harus memastikan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah sekaligus membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan ekonomi lokal. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya menekankan pentingnya pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi serta harmoni sosial (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah harus memiliki misi yang jelas. Pernyataan misi akan memberikan arah fokus organisasi, menjelaskan bagaimana pelaksanaan tugas dilakukan (LAN & BPKP, 2000).

Penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholis (2007). Pertama adalah pendekatan *ultra vires doctrine*, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintah kepada daerah otonom dengan merinci satu per satu bidang kewenangan yang diserahkan. Kedua adalah pendekatan *open end arrangement* atau *general competence*, di mana daerah otonom diizinkan untuk menyelenggarakan semua urusan kecuali yang secara eksplisit dimiliki oleh pemerintah pusat.

Pengertian Potensi Maritim memiliki makna yang mendalam. Secara umum, potensi maritim, khususnya potensi perikanan, perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Namun, peningkatan pemanfaatan potensi maritim ini harus mempertimbangkan kapasitas potensi itu sendiri. Sumber daya maritim lainnya seperti bahan mineral dan minyak adalah sumber daya yang tidak dapat pulih (*non renewable*), sehingga strategi pemanfaatannya harus berbeda dengan sumber daya yang dapat pulih (*renewable*) seperti sumber daya perikanan. Pada sumber daya yang tidak dapat pulih seperti mineral dan bahan tambang, strategi pemanfaatannya lebih banyak dipengaruhi oleh sinyal dan indikator ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ini bergantung pada harga dan biaya yang terkait. Namun, untuk sumber daya yang dapat pulih, strategi pemanfaatannya lebih kompleks.

Strategi pengembangan potensi maritim memerlukan aparatur yang tidak hanya memiliki disiplin dan ketekunan, tetapi juga kreativitas dan inovasi (Suwarno, Verne, & Pribadi, 2019). Ini menunjukkan pentingnya kombinasi kemampuan untuk menjaga sumber daya maritim, mengelola mereka dengan efisien, dan menciptakan inovasi yang dapat mengoptimalkan potensi tersebut. Kebijakan pengembangan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim

memiliki dampak langsung pada masalah transportasi dan perdagangan negara kepulauan, seperti Indonesia. Pelabuhan laut, khususnya pelabuhan internasional, merupakan komponen penting dalam pembangunan tol laut, dan manfaat ekonominya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti efisiensi dan produktivitas, lingkungan, aspek sosial dan kelembagaan, serta pertumbuhan permintaan terhadap jasa pelabuhan (Fauzi, 2005).

Kebijakan konektivitas maritim dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, mobilitas masyarakat antar wilayah, dan daya saing nasional. Kendala dalam pengembangan kebijakan ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal kepelabuhanan dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup hal-hal seperti waktu bongkar-muat, birokrasi perizinan, kapasitas infrastruktur yang ada, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, aspek eksternal melibatkan masalah seperti ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, teknologi dan informasi, pendanaan, serta komitmen pemerintah (Adam, 2015). Ini menunjukkan kompleksitas dalam mengembangkan konektivitas maritim dan pentingnya mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam transportasi dan perdagangan maritim.

## SIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten selayar dalam mengembangkan potensi maritim di Kabupaten selayar terbagi menjadi dua yaitu upaya eksternal yaitu Strategi yang digunakan terhadap pihak luar yang terdiri dari: Investor, atau Pemodal Asing, dan Mitra lainnya

Adapun upaya internal yakni strategi yang digunakan terhadap Kabupaten kepulauan selayar itu sendiri yang terdiri atas: Pengembangan potensi pariwisata alam, kuliner, Pengembangan ke arah industri perikanan, makanan kaleng, pabrikan bahan baku makanan laut, Pengembangan ke arah konservasi kelautan dengan menjadikan wilayah laut yang rentan sebagai daerah cagar budaya. Dalam praktiknya, pengembangan potensi kemaritiman di Kabupaten selayar mengalami berbagai tantangan maupun peluang. Upaya menghadapi hambatan tersebut diantaranya adalah melakukan moderasi terhadap para pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mendeksripsikan apa hal-hal yang paling baik untuk pengembangan potensi kemaritiman yang ada di Kabupaten kepulauan selayar. Penting untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama agar implementasi kebijakan berjalan lancar hingga akhirnya. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini adalah melakukan reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan sistem administrasi. Salah satu inisiatif yang dapat diambil adalah meluncurkan layanan birokrasi yang dapat diakses secara mobile, baik di perairan maupun di daratan, dengan menggunakan perahu atau kapal

yang terhubung dengan layanan dan internet. Ini akan memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu, langkah lain yang perlu diambil adalah memperbaiki infrastruktur, dan membuka peluang investasi secara luas. Dengan mengoptimalkan peluang investasi, daerah dapat lebih mudah menarik investasi ke wilayah tersebut. Langkah ini dapat membawa manfaat ekonomi dan pembangunan yang lebih besar untuk kabupaten kepulauan Selayar. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan mendukung pemajuan wilayah kepulauan Selayar menuju tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang bisa diambil adalah:

1. Moderasi antara Pemangku Kepentingan: Pemerintah Daerah dapat memoderasi diskusi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mendeskripsikan langkah-langkah terbaik dalam pengembangan potensi kemaritiman di Kabupaten Selayar, Ini dapat membantu menciptakan kesepakatan bersama dan mencapai visi yang lebih efektif.
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan: Melakukan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan sistem administrasi, serta memperkenalkan layanan pelayanan birokrasi yang mobile baik di laut maupun di daratan menggunakan kapal atau perahu yang terhubung dengan pelayanan dan internet. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Perbaikan infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, jalan, jembatan, dan bandara, meningkatkan konektivitas antara pulau-pulau dan wilayah-wilayah pesisir. Hal ini memudahkan aliran barang dan orang antarwilayah, mendorong perdagangan, dan mendukung mobilitas ekonomi serta pariwisata, Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya tarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran operasional bisnis dan kegiatan ekonomi, serta pembangunan wilayah terluar, Infrastruktur yang dikembangkan di pulau-pulau terluar atau daerah pesisir terpencil dapat meningkatkan konektivitas dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
4. Fasilitasi Investasi: Mendorong peluang investasi sebanyak mungkin agar investor dapat lebih mudah masuk ke wilayah Kabupaten Bintan. Dengan memfasilitasi proses investasi, perekonomian lokal akan tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Dukungan bagi Nelayan: Meningkatkan dukungan permodalan bagi para nelayan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penyaluran kredit usaha rakyat, investasi langsung, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan besar, atau melalui

koperasi-koperasi nelayan. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat-alat modal, peralatan operasional seperti perahu dan mesin, alat tangkap ikan, alat navigasi, teknologi ramah lingkungan, bahan bakar, dan fasilitas pengolahan dan pelelangan ikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pengembangan potensi kemaritiman di Kabupaten Selayar dapat lebih optimal, mendukung konektivitas, ekonomi, pariwisata, keamanan, dan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2015). Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia. *Politica*, 6(1), 20-41.
- Brown, Lianne, et. Al. (2001). *Measuring Capacity Building*, Carolina population Center. Chapel Hill: University of North Carolina.
- Bungin, M. B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, Merilee S. (1977). *Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*. Cambridge, Boston, MA: Harvard University Press.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga. Administrasi Negara.
- Manaf, Murshal. (2015). Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. *Univeritas* 45 Makassar. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/download/990/962>
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grassindo.
- Pardosi, A. S. (2016). Potensi dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 4 (1) 017-026.
- Prasetyantoko, A., Bahagijo, S., & Budiyanto, S. (2012). *Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusif di Indonesia, dalam Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Kasta Hasta.
- Sitompul, C. (2015). *Pemkab Bintan Salurkan Bantuan untuk Nelayan Senilai Rp 14 Miliar*. Retrieved from <http://bintan.batamtoday.com/berita64112-Pemkab-Bintan-Salurkan-Bantuan-untuk-Nelayan-Senilai-Rp-14-Miliar.html>.

- Suwarno, Y., Verne, B. Y., & Pribadi, I. (2019). Implementasi Kebijakan Pembinaan Potensi Maritim Terhadap Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. <http://Journal of Public Policy Applied Administration>, 1(2), 107-110.
- Tripinto tour. 'Segitiga Terumbu Karang'. 2017 <https://www.tripinto.co.id/segitiga-terumbu-karang-dunia/>.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.
- Yuwono, T. (2003). Capacity Building in the Local Government: Concept and Analysis. Seminar Intemasional Democracy and Local Politics diselenggarakan oleh PSSAT UGM, STPMD. 7-8 Januari. Yogyakarta: APMD, UAJY.